

MAKALAH
AKUTANSI SEKTOR PUBLIK
“LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK”

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujiati, M. Pd.
2. Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.
3. Farika Dwi Utari, S. Pd., M. Pd.



Disusun Oleh Kelompok 10:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Desmala Az Zahra | 2313031002 |
| 2. Muhammad Rizqi Alfiah | 2313031008 |

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang berjudul “Laporan Keuangan Sektor Publik” secara tepat waktu dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Pujiati, M.Pd., Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA, serta Ibu Farika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan serta dukungan yang sangat berarti selama proses penyusunan makalah ini berlangsung.

Makalah ini telah disusun secara maksimal berdasarkan pengetahuan, analisis, dan referensi ilmiah yang penulis akses. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, penulis dengan kerendahan hati sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna perbaikan serta penyempurnaan makalah ini di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 01 November 2025

Kelompok 10

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Pembelajaran	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik	3
2.2 Tujuan Serta Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik.....	4
2.3 Komponen Yang Membentuk Laporan Keuangan Dalam Sektor Publik...	7
2.4 Pihak-Pihak Yang Menggunakan Laporan Keuangan Sektor Publik	11
2.5 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta	12
BAB III PENUTUP	14
3.1 Kesimpulan	14
3.2 Saran.....	14
STUDI KASUS	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan di institusi pemerintahan dan organisasi publik memerlukan transparansi serta tanggung jawab yang tinggi agar masyarakat dapat memahami efektivitas penggunaan dana publik. Laporan keuangan sektor publik memainkan peranan vital sebagai media yang mengkomunikasikan kondisi keuangan, pencapaian kinerja, dan perubahan yang terjadi dalam suatu entitas selama periode tertentu kepada pihak yang berkepentingan. Dengan adanya laporan keuangan, publik bisa melihat apakah proses pengelolaan dana telah sesuai prinsip efisiensi dan regulasi yang berlaku, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Di Indonesia, pedoman penyusunan laporan keuangan di sektor pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Regulasi ini menetapkan bahwa setiap laporan keuangan harus mengutamakan dua karakteristik penting, yaitu relevansi dan keandalan. Kriteria relevan berarti informasi dalam laporan mampu memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan serta disajikan secara tepat waktu, sedangkan keandalan menuntut data yang jujur, dapat diverifikasi, dan bebas kepentingan.

Selain memberikan gambaran posisi keuangan, laporan keuangan juga menjadi alat evaluasi dan komunikasi kinerja pemerintah kepada masyarakat, guna memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam perspektif akuntansi sektor publik, laporan ini tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga berperan strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengelolaan keuangan negara.

Dengan adanya peran penting tersebut, sangatlah relevan untuk memahami konsep, tujuan, serta karakteristik laporan keuangan di sektor publik, agar transparansi dan akuntabilitas institusi negara semakin meningkat dalam pengelolaan dana publik yang bertanggung jawab dan efisien.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengertian Laporan Keuangan Pada Sektor Publik?
2. Apa Saja Tujuan Serta Fungsi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik?
3. Apa Unsur Atau Komponen Yang Membentuk Laporan Keuangan Dalam Sektor Publik?
4. Siapa Pihak-Pihak Yang Menggunakan Laporan Keuangan Sektor Publik?
5. Dalam Hal Apa Laporan Keuangan Sektor Publik Berbeda Dari Laporan Keuangan Sektor Swasta?

1.3.Tujuan

1. Untuk Pengertian Laporan Keuangan Pada Sektor Publik.
2. Untuk Mengetahui Tujuan Serta Fungsi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik.
3. Untuk Mengetahui Unsur Atau Komponen Yang Membentuk Laporan Keuangan Dalam Sektor Publik.
4. Untuk Mengetahui Pihak-Pihak Yang Menggunakan Laporan Keuangan Sektor Publik.
5. Untuk Mengetahui Dalam Hal Apa Laporan Keuangan Sektor Publik Berbeda Dari Laporan Keuangan Sektor Swasta.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan sektor publik memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan maupun organisasi publik lainnya. Melalui laporan keuangan, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana dana publik dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, laporan keuangan menjadi sarana utama untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta perubahan kondisi keuangan suatu entitas dalam periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Menurut Rasdianto, dkk. (2013), laporan keuangan sektor publik merupakan hasil dari proses identifikasi, pengukuran, dan pencatatan atas berbagai transaksi ekonomi dan keuangan yang terjadi pada entitas akuntansi di suatu instansi. Hasil dari proses tersebut menghasilkan informasi yang digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan serta sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Pandangan ini menekankan bahwa laporan keuangan sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pencatatan, melainkan sebagai media informasi yang mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Selain itu, dasar hukum penyusunan laporan keuangan sektor publik di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah harus memenuhi dua karakteristik kualitatif utama, yaitu relevansi dan keandalan (reliability). Informasi dikatakan relevan apabila dapat memberikan manfaat nyata bagi pengambilan keputusan, memiliki nilai umpan balik dan prediktif, serta disajikan tepat waktu. Sementara itu, keandalan berarti bahwa informasi yang disajikan harus jujur, dapat diverifikasi, dan bebas dari keberpihakan. Dengan memenuhi kedua kriteria tersebut, laporan keuangan

pemerintah dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang kredibel dan bernilai informatif tinggi.

Lebih lanjut, Mardiasmo (2009) menegaskan bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan bentuk akuntabilitas publik, yaitu kewajiban pihak pengelola dana publik untuk memberikan pertanggungjawaban, menyampaikan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas keuangan kepada masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak untuk menilai kinerjanya. Dengan kata lain, laporan keuangan sektor publik menjadi media komunikasi antara pemerintah sebagai pengelola keuangan dan masyarakat sebagai pemilik sumber daya publik.

Jika dibandingkan dengan laporan keuangan sektor swasta, laporan keuangan sektor publik memiliki orientasi yang berbeda. Sektor swasta berfokus pada pencapaian laba (*profit motive*), sedangkan sektor publik lebih menekankan pada tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat (*public service accountability*). Oleh karena itu, laporan keuangan sektor publik tidak disusun untuk menilai tingkat keuntungan, tetapi untuk memastikan bahwa dana publik telah dikelola secara transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban resmi atas pengelolaan dana publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau organisasi nirlaba lainnya. Laporan ini berfungsi sebagai alat komunikasi dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah, sekaligus sebagai sarana untuk mendukung prinsip *good governance*, yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, definisi yang dikemukakan oleh Rasdianto dkk. (2013) serta dasar hukum yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 menggambarkan bahwa laporan keuangan sektor publik tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

2.2. Tujuan Serta Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik.

A. Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan sektor publik merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyampaikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan, baik pihak internal maupun eksternal, dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Menurut Halim (2009) dalam Kurniawan (2013), tujuan laporan keuangan sektor publik adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan hasil operasi keuangan suatu entitas publik selama satu periode akuntansi, yang dapat digunakan untuk menilai kinerja dan pertanggungjawaban pemerintah.

Sementara itu, Handayani, Maulana, dan Dewi (2024) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan sektor publik mencakup penyediaan informasi yang berguna dalam pengelolaan sumber daya publik secara efisien, ekonomis, dan efektif. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya berperan sebagai bentuk pelaporan administratif, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan pengendalian kebijakan publik. Secara lebih rinci, tujuan laporan keuangan sektor publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memberikan Informasi Mengenai Posisi Keuangan Pemerintah

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menggambarkan kondisi keuangan pemerintah dalam satu periode tertentu. Informasi ini mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas dana, yang menjadi dasar bagi penilaian kesehatan keuangan entitas publik.

2. Menunjukkan Akuntabilitas dan Pertanggung jawaban Publik

Laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik. Pemerintah wajib menunjukkan bagaimana dana masyarakat digunakan dan apakah penggunaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Mendukung Proses Pengambilan Keputusan

Informasi keuangan yang akurat membantu para pembuat kebijakan, legislatif, maupun masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi dan politik. Misalnya, dalam menentukan alokasi anggaran, evaluasi program, atau perencanaan pembangunan.

4. Menjadi Dasar untuk Evaluasi Kinerja Pemerintah

Melalui laporan keuangan, masyarakat dan lembaga pengawas dapat menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dilakukan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan pencapaian target anggaran.

5. Menunjang Transparansi dan Kepercayaan Publik

Laporan keuangan yang disajikan secara jujur dan terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, serta memperkuat prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara.

B. Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Selain memiliki tujuan tertentu, laporan keuangan sektor publik juga berfungsi sebagai alat manajemen, pengawasan, serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Darise (2008:161) yang dikutip dalam Kurniawan M. Manangkalangi (2013), terdapat enam fungsi utama laporan keuangan sektor publik, yaitu:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan

Fungsi ini menekankan pentingnya laporan keuangan sebagai alat untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan akuntansi pemerintah. Laporan keuangan juga digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan dilakukan dengan tertib, efisien, dan akuntabel.

2. Akuntabilitas dan Laporan Retrospektif

Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana akuntabilitas publik, yaitu bentuk tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan dana masyarakat. Fungsi retrospektif berarti laporan keuangan memberikan informasi tentang kegiatan dan hasil keuangan di masa lalu, yang dapat digunakan untuk evaluasi dan pembelajaran di masa depan.

3. Kelangsungan Organisasi

Melalui laporan keuangan, pemerintah dapat menilai kemampuan entitas dalam melanjutkan kegiatan operasionalnya. Informasi keuangan membantu memastikan bahwa sumber daya publik dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk pelayanan masyarakat.

4. Perencanaan dan Informasi Otorisasi

Data yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi dasar bagi perencanaan kegiatan di periode berikutnya. Laporan ini juga berfungsi sebagai alat otorisasi yang menunjukkan bahwa penggunaan dana publik telah sesuai dengan anggaran yang disetujui.

5. Hubungan Masyarakat (Public Relations)

Laporan keuangan juga berfungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan penyajian laporan yang transparan dan akurat, kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan dapat meningkat, sehingga memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara.

6. Sumber Fakta dan Gambaran

Laporan keuangan berfungsi sebagai sumber data yang faktual mengenai kondisi keuangan organisasi publik. Informasi tersebut digunakan oleh berbagai pihak untuk analisis ekonomi, evaluasi kebijakan, serta pengambilan keputusan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Selain itu, Handayani et al. (2024) menambahkan bahwa laporan keuangan sektor publik juga berfungsi sebagai alat pengendalian internal, media transparansi, dan sarana evaluasi kebijakan publik. Fungsi ini menjadikan laporan keuangan sebagai komponen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

2.3 Komponen Yang Membentuk Laporan Keuangan Dalam Sektor Publik

Laporan keuangan sektor publik merupakan media penting untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Melalui laporan ini, pemerintah dapat menunjukkan bagaimana sumber daya publik diperoleh, dikelola, dan digunakan dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Halim (2014) dalam buku *Akuntansi Sektor Publik*, laporan keuangan sektor publik disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas pemerintah dalam satu periode anggaran.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil dari proses akuntansi yang mencerminkan posisi keuangan dan kinerja keuangan pemerintah yang bersangkutan.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan sektor publik, sebagaimana dijelaskan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP, 2007) dan dipertegas oleh Halim (2009), terdiri atas tujuh jenis laporan utama berikut ini:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, serta pembiayaan selama satu periode anggaran dan dibandingkan dengan anggarannya.

Menurut KSAP (2007:81), LRA menggambarkan tingkat ketaatan pemerintah terhadap pelaksanaan anggaran yang telah disetujui oleh legislatif. Laporan ini menjadi alat pengendalian dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

Elemen-elemen utama dalam LRA meliputi:

- Pendapatan, yaitu semua penerimaan kas oleh pemerintah yang menambah ekuitas dana lancar.
- Belanja, yaitu semua pengeluaran pemerintah yang mengurangi ekuitas dana lancar.
- Transfer, baik penerimaan maupun pengeluaran antar entitas pemerintah.
- Surplus/Defisit, yaitu selisih antara pendapatan dan belanja.
- Pembiayaan, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan (misalnya, sisa lebih anggaran tahun lalu) dan pengeluaran pembiayaan (seperti penyertaan modal pemerintah).
- Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA), yang menunjukkan sisa saldo anggaran pada akhir periode.

Menurut Halim (2014), LRA sangat penting karena menunjukkan bagaimana pemerintah merealisasikan rencana keuangannya dan seberapa

jauh anggaran digunakan sesuai dengan target dan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan ini berfungsi untuk menunjukkan perubahan pada saldo anggaran lebih antara awal dan akhir periode pelaporan. Menurut Halim (2014), saldo anggaran lebih mencerminkan sisa sumber daya anggaran yang masih dimiliki pemerintah dan dapat digunakan pada periode berikutnya.

Perubahan saldo ini dapat terjadi akibat adanya surplus atau defisit anggaran, koreksi atas kesalahan periode sebelumnya, serta penyesuaian yang timbul dari kebijakan baru pemerintah daerah. Laporan ini menjadi indikator penting bagi manajemen keuangan publik untuk menilai keberlanjutan fiskal serta kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas anggaran.

3. Neraca (*Balance Sheet*)

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP, 2007), neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki oleh entitas pelaporan.

Komponen-komponen utama dalam Neraca antara lain:

- Aset, yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah dan memberi manfaat di masa depan. Aset dibedakan menjadi aset lancar (kas, piutang, persediaan) dan aset tetap (tanah, bangunan, peralatan, dan aset lainnya).
- Kewajiban, yaitu utang pemerintah yang timbul dari transaksi masa lalu dan harus dilunasi pada masa mendatang, seperti utang belanja, utang bunga, dan utang pembiayaan.
- Ekuitas Dana, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah, yang menggambarkan kekayaan bersih pemerintah.

Menurut Halim (2014), neraca berfungsi untuk menilai kondisi keuangan pemerintah pada akhir tahun anggaran dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi serta kebijakan publik.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional digunakan untuk memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional pemerintah yang berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan ekuitas dalam satu periode pelaporan. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, laporan operasional mencakup seluruh transaksi yang bersifat operasional maupun non-operasional yang menggunakan basis akrual.

Komponen utama laporan operasional meliputi:

- Pendapatan-LO, yaitu seluruh hak pemerintah yang menambah ekuitas selama periode berjalan.
- Beban, yaitu pengorbanan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik.
- Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, yaitu selisih antara pendapatan dan beban operasional.
- Kegiatan Non-Operasional, seperti hibah, sumbangan, atau hasil investasi.

Menurut Mardiasmo (2018) dalam *Akuntansi Sektor Publik*, laporan operasional menjadi alat penting untuk menilai kinerja keuangan pemerintah berdasarkan pendekatan akrual, bukan hanya kas.

5. Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*)

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas selama satu periode pelaporan. Menurut Halim (2014), laporan arus kas bermanfaat untuk menilai kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas dan menggunakan kas tersebut untuk kegiatan operasional, investasi, maupun pembiayaan.

Laporan ini dibagi menjadi tiga jenis aktivitas utama:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi (misalnya penerimaan pajak, retribusi, dan belanja rutin).
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi (pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi jangka panjang).
3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan (pinjaman, pelunasan utang, dan penyertaan modal).

Dengan laporan arus kas, pemerintah dapat mengukur likuiditas dan kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan ini menjelaskan perubahan ekuitas pemerintah dalam satu periode pelaporan. Menurut Halim (2014), laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan dana pemerintah yang menyebabkan kenaikan atau penurunan kekayaan bersih.

Komponen utamanya meliputi:

- Ekuitas awal periode,
- Surplus/defisit dari laporan operasional,
- Koreksi kesalahan periode sebelumnya,
- Perubahan kebijakan akuntansi,
- Ekuitas akhir periode.

Laporan ini membantu menilai stabilitas keuangan dan kebijakan pengelolaan dana publik secara menyeluruh.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian penting dari laporan keuangan pemerintah yang memberikan penjelasan tambahan dan informasi kontekstual mengenai angka-angka dalam laporan utama.

Menurut Margono (2010) dalam *Akuntansi Sektor Publik*, CaLK mencakup kebijakan akuntansi yang digunakan, penjelasan tentang pos-pos utama dalam laporan keuangan, serta informasi tambahan lain yang relevan dengan kondisi keuangan pemerintah.

CaLK juga memuat uraian tentang kebijakan fiskal dan keuangan, kendala yang dihadapi, serta penjelasan non-keuangan yang membantu masyarakat memahami kinerja keuangan pemerintah secara menyeluruh.

2.4 Pihak-Pihak Yang Menggunakan Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut Drebin (1981), laporan keuangan pada sektor publik dimanfaatkan oleh beragam pihak yang memiliki peran dan kepentingan yang tidak sama. Terdapat sepuluh kelompok utama yang menjadi pengguna informasi tersebut, yaitu:

1. Wajib pajak
2. Pihak pemberi bantuan dana
3. Investor atau penanam modal
4. Pengguna layanan publik
5. Pegawai instansi
6. Pihak penyedia barang dan jasa
7. Anggota lembaga legislatif
8. Pihak manajemen organisasi publik
9. Pemilih atau masyarakat
10. Lembaga pengawas

Pengelompokan ini berdasar pada peran mereka dalam ekosistem sektor publik. Misalnya, pembayar pajak, donor, investor, dan pengguna layanan, secara finansial berkontribusi pada operasional organisasi. Karyawan dan pemasok menyediakan sumber daya manusia maupun material yang diperlukan. Sementara legislatif dan manajemen bertanggung jawab pada pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya, dengan aktivitas mereka dikontrol melalui mekanisme pengawasan dari pemilih dan badan pengawas.

Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan sektor publik bertujuan memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh kelompok tersebut, sehingga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik di lingkungan organisasi publik.

Lebih lanjut, Mardiasmo (2010) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan prioritas utama, sebab mereka berkontribusi lewat pajak dan retribusi. Selain itu, anggota legislatif, pengawas eksternal, serta manajemen instansi pemerintah juga bergantung pada laporan keuangan guna mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan publik.

Laporan keuangan sektor publik menjadi sumber utama bagi pemangku kepentingan untuk mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pemanfaatan sumber daya yang mereka kelola, baik dari aspek transparansi, efisiensi, maupun keadilan antargenerasi.

2.5 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta.

Laporan keuangan sektor publik dan swasta memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi tujuan, orientasi akuntabilitas, komponen laporan, standar akuntansi, hingga pihak pemeriksa dan jenis informasi yang disajikan.

a. Berdasarkan Tujuan dan Orientasi

Laporan keuangan sektor publik disusun untuk memenuhi akuntabilitas kepada masyarakat luas dan parlemen, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik serta pelayanan publik yang diberikan. Menurut Indra Bastian (2010), sektor publik berfokus pada pencapaian kesejahteraan masyarakat, sementara sektor swasta bertujuan utama memperoleh laba dan memaksimalkan keuntungan organisasi bisnis.

b. Berdasarkan Standar Akuntansi dan Komponen Laporan

Laporan keuangan sektor publik mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan menekankan pelaporan anggaran, surplus/defisit, serta berbagai sumber dana, menyesuaikan kebutuhan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan negara atau daerah. Sedangkan sektor swasta mengacu pada standar akuntansi keuangan (SAK) dan IFRS, berfokus pada laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan perubahan ekuitas untuk informasi kepada pemegang saham serta kreditor.

c. Akuntabilitas dan Pihak Pemeriksa

Akuntabilitas sektor publik mengarah kepada masyarakat dan pemerintah/legislatif (misalnya BPK sebagai auditor eksternal). Sementara itu, sektor swasta hanya bertanggung jawab pada pemegang saham dan kreditor, serta diperiksa oleh auditor independen.

d. Fleksibilitas Penganggaran dan Penyusunan Laporan

Menurut Angelika (2024), di sektor publik, pelaporan keuangan dan penganggaran bersifat otoritatif, wajib dipatuhi, dan melibatkan pihak legislatif serta masyarakat. Sektor swasta sebaliknya bersifat lebih fleksibel dalam penganggaran dan penyesuaian laporan untuk kebutuhan bisnis.

e. Jenis Informasi yang Diungkapkan

Laporan keuangan sektor publik mengungkapkan penggunaan dana, pencapaian program, dan efektivitas kebijakan publik. Sedangkan sektor swasta menyoroti profitabilitas, posisi keuangan, dan efisiensi usaha.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Laporan keuangan pada institusi sektor publik merupakan sarana pokok untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh entitas pemerintah maupun organisasi publik lainnya. Laporan ini bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan media informasi penting yang memberikan gambaran menyeluruh terkait posisi keuangan, kinerja fiskal, dan perubahan kondisi keuangan selama periode tertentu, sehingga dapat dipakai sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, laporan keuangan sektor publik berfungsi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjaga integritas, kepercayaan publik, dan memastikan pengelolaan anggaran yang efektif serta sesuai regulasi yang berlaku.

3.2 Saran

Penyusunan laporan keuangan di sektor publik sebaiknya dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan prinsip relevansi, keandalan, dan keterbukaan informasi agar kualitas penyajiannya dapat memenuhi standar dan kebutuhan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal organisasi. Diperlukan pelatihan dan pembaruan pengetahuan secara berkala bagi pengelola keuangan agar mampu mengikuti perkembangan regulasi serta standar akuntansi terbaru, termasuk membangun sistem pengendalian internal yang kuat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai laporan keuangan sektor publik difokuskan pada identifikasi tantangan penerapan tata kelola dan upaya peningkatan transparansi, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab.

STUDI KASUS

Di Kota Urbania terdapat dua rumah sakit yang menjadi pusat rujukan utama, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sehat Selalu yang berada di bawah pengelolaan pemerintah kota dan Rumah Sakit Medika Pratama yang dikelola oleh pihak swasta. RSUD diwajibkan menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan rumah sakit swasta menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau International Financial Reporting Standards (IFRS).

Pada hasil audit tahun 2024, ditemukan adanya perbedaan mencolok dalam komponen laporan keuangan antara kedua institusi tersebut. RSUD menyajikan laporan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sementara itu, rumah sakit swasta hanya menyusun Laporan Laba Rugi, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Perbedaan penerapan standar akuntansi tersebut menimbulkan dampak terhadap bentuk dan fungsi pelaporan. Laporan keuangan RSUD menjadi perhatian legislatif dan pemangku kepentingan publik karena memberikan informasi rinci mengenai penggunaan anggaran, realisasi dana publik, serta implementasi program pelayanan kesehatan. Namun, bahasa yang digunakan dalam laporan RSUD cenderung teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat awam tanpa adanya penjelasan tambahan. Sebaliknya, laporan keuangan rumah sakit swasta lebih ringkas serta menitikberatkan pada aspek profitabilitas dan efisiensi operasional.

Pertanyaan Studi Kasus:

1. Bandingkan struktur dan tujuan pelaporan keuangan antara RSUD sebagai sektor publik dan Medika Pratama sebagai swasta berdasarkan karakteristik pelaporan, pengguna laporan, dan tuntutan akuntabilitas!

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi dan Laporan Keuangan Sektor Publik.” 2021. Repository Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dewantara. Accessed February 22, 2021. <http://repository.stiedewantara.ac.id/>.
- Angelika, K. N. (2024). Analisis Perbandingan Kualitas Laporan Keuangan Antara Perusahaan Publik dan Swasta. *Mandalika Law Journal*, 27.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Handayani, A., Maulana, J., & Dewi, P. K. (2024). *Studi Literatur: Implementasi Teori Akuntansi pada Laporan Keuangan Sektor Publik. Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan (JEAP)*, 1(2), 114–123. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i2.100>
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2007). *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. Jakarta.
- Kurniawan, M. M. (2013). *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA*, 1(3), 22–31. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1936>
- Halim, A. (2009). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Margono, S. (2010). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi.